

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PEMBANGUNAN DESA:
(Studi Kasus Kebijakan CSR PT Solusi Bangun Indonesia dalam Mendukung
Kemandirian Pembangunan Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten
Tuban)**

Ahmad Wahib Al Haitimi¹, Darsono², Ratna Ani Lestari³
¹²³ Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: gagukalhaitimi@gmail.com,

²Corresponding Authors, email: darsono_fbs@uwks.ac.id

³Corresponding Authors, email: ratnalestari1206@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3734>

Received: 1 February 2024

Revised: 23 April 2024

Accepted: 14 May 2024

Abstrak

CSR menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Peran CSR juga sangat penting dalam membantu desa pada proses pembangunan atau program-program Desa. Pengambilan kebijakan untuk pemberian CSR kepada Desa Merkawang pada prinsipnya melibatkan pihak masyarakat, pihak pemerintah, dan pihak perusahaan. Road map CSR Solusi Bangun Indonesia disusun berdasarkan kegiatan *road map* tahun sebelumnya yang diekstrapolasi sejauh lima tahun yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan ataupun kebutuhan yang mendesak. Implikasi adanya CSR berdasarkan data penelitian pada prinsipnya sangat menunjang meningkatnya Indeks Desa Membangun di Desa Merkawang menuju desa maju dan mandiri yaitu aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa.

Kata Kunci: kebijakan, CSR, desa, pembangunan, Tuban

Abstract

CSR is a form of corporate responsibility towards the social conditions of the surrounding community. The role of CSR is also important in helping villages in the development process or village programs. Policy making for providing CSR to Merkawang Village in principle involves the community, the government and the company. Solusi Bangun Indonesia's CSR road map was prepared based on the previous year's road map activities which were extrapolated over five years and then adjusted to urgent problems or needs. The implications of CSR based on research data are in principle very supportive of increasing the Village Development Index in Merkawang towards a developed and independent village, namely social, economic and ecological aspects which are complementary forces and maintain the village's potential and ability to improve the lives of village communities.

Keywords: policy, CSR, village, development, Tuban

PENDAHULUAN

Sebagai piranti yang digunakan untuk menjaga keseimbangan sosial, *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate*) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan daya dukung lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat.

PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk. merupakan perusahaan publik Indonesia yang mayoritas sahamnya (83,52 %) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang bergerak pada produksi semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Pabrik PT SBI ini berada di wilayah Kecamatan Jenu dan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Setiap Tahunnya PT SBI ini selalu mengeluarkan CSR yang diberikan kepada pemerintah desa atau masyarakat di sekitar perusahaan.

Semua program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), anak perusahaan PT Semen Indonesia (SI) selama ini berjalan dengan baik dan berbasis kepada pembangunan berkelanjutan (SDGs). Program-program tersebut telah disalurkan kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang berada di ring satu perusahaan. Terdapat lima pilar CSR di dalam PT SBI yang direalisasikan melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan, yaitu SBI Cerdas, SBI Sehat, SBI Mandiri, SBI Lestari, dan SBI Peduli. Tiap-tiap pilar diimplementasikan dalam berbagai

program yang berbeda, seperti SBI Cerdas untuk pembangunan sarana-prasarana pendidikan, program beasiswa, kejar paket, gerakan orang tua asuh, pemberantasan buta huruf, sekolah alam, hingga pembangunan perpustakaan, lalu SBI Sehat berupa pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari Posyandu, pengobatan gratis, hingga pembangunan rumah layak huni, SBI Mandiri yang membentuk program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan koperasi dan ekonomi mikro, pemberdayaan masyarakat nelayan sampai pada tahap pengolahan pangan, serta pengembangan usaha kuliner, SBI Lestari yang meliputi sejumlah program yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain program kesadaran lingkungan, pembibitan, bank sampah, dan penciptaan eco-park, dan SBI Peduli untuk menjalankan program berupa mendukung pengembangan kegiatan sosial budaya, termasuk dukungan kehidupan beragama, program tanggap darurat, serta bencana alam.

Proses penentuan pemberian CSR PT SBI ini tentu melalui berbagai pertimbangan yang pada prinsipnya harus simbiosis mutualisme antara perusahaan dan penerima CSR, sehingga dalam proses penentuan ini mejadi salah satu proses keputusan politik yang tidak bisa dihindari dalam pembuatan road map CSR. Pentingnya CSR sebagai salah satu bantuan yang diberikan kepada desa merupakan bentuk dukungan perusahaan atau instansi dalam proses pembangunan di desa. Selain itu, pihak desa juga memerlukan adanya dukungan dari semua pihak sehingga perlu adanya langkah-langkah yang diambil oleh pihak desa, mulai dari komunikasi dengan para *stakeholder*, musyawarah dengan masyarakat, dan juga penggalian potensi desa.

Masalahnya, kebijakan atas *roadmap* CSR yang dikembangkan oleh PT SBI sering tidak sesuai dengan

kebutuhan pembangunan desa Merkawang, bukan hanya ketika desa ini sedang membangun menuju desa mandiri, namun juga ketika Desa Merkawang terus berkembang untuk mempertahankan status desa mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Tanpa bermaksud untuk intervensi dalam penentuan CSR PT SBI, keterlibatan perangkat desa dalam menentukan arah dan *roadmap* CSR akan mengaktifkan-efisienkan pemanfaatan CSR secara maksimal. Tentu saja desa juga memahami bahwa kebijakan CSR perusahaan sebagai keputusan politik akan melibatkan banyak kepentingan sehingga berbagai komponen kelembagaan juga akan terlibat di dalamnya.

Sebagai tambahan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa mempunyai 4 aspek, yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Konsep desa mandiri merupakan sebuah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang mudah, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD atau Indeks Pembangunan Desa lebih dari 75 sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan.

Strategi yang sudah biasa dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari sisi internal meliputi empat hal, yaitu (1) pembangunan kapasitas masyarakat atau warga dan ormas yang ada di desa supaya kritis serta dinamis, (2) semakin memperkuat kapasitas pemerintah desa dan hubungan yang dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran

dana desa yang responsif dan partisipatif, dan (4) pembangunan lembaga ekonomi di tingkat lokal yang mandiri dan produktif, termasuk wawasan ekososioekopreneur (Darsono, Lestari, dan Mustafa, 2023). Hal ini sekaligus untuk menjamin terlaksananya *good governance* dalam pemerintahan desa, sebagaimana hasil penelitian Sumiyati dan Darsono (2023) yang menekankan pentingnya dilakukan dialog publik untuk memicu keterlibatan dan kepercayaan publik, terutama adanya keterlibatan perusahaan-perusahaan di sekitar desa melalui *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses keputusan politik CSR PT Solusi Bangun Indonesia?
2. Bagaimana roadmap CSR PT Solusi Bangun Indonesia?
3. Apa Implikasi CSR PT Solusi Bangun Indonesia terhadap pembangunan kemandirian Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERSPEKTIF TEORETIS

1. Penelitian Terdahulu

Riset yang mengambil tema CSR relatif banyak, meski untuk pengambilan keputusan politik CSR PT Solusi Bangun Indonesia, terutama di Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban pada dasarnya belum ada.

T. Romi Marnelly (2012) yang mengkaji CSR dengan tinjauan teori dan praktek di Indonesia menemukan bahwa gagasan CSR menekankan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan lagi mencari profit semata, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, ketergantungan pada kesehatan keuangan tidaklah

menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Program CSR dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang didasarkan pada kebutuhan riil yang secara dialogis dikomunikasikan dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, masyarakat dan akademisi.

Asa Ria Pranoto dan Dede Yusuf (2014) mengkaji “Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya”. Hasilnya menunjukkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memerhatikan aspek sosial dan lingkungan. PT Pertamina EP sebagai salah satu perusahaan industri besar dan beroperasi secara internasional memiliki permasalahan mendasar dalam penerapan CSR, yaitu perencanaan dan pelaksanaan program CSR tersebut, serta indikator yang dipakai PT Pertamina EP agar mampu menerapkan CSR yang baik mengacu pada dokumen MDGs, perundang-undangan serta ISO 26000. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi pelaksanaan serta tanggapan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan.

Sri Murni, Jamal Amin, Nur Fitriyah (2015) mengkaji “Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu” dan menemukan bahwa peranan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa di desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara keseluruhan belum merata hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat desa, tetapi telah

menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, dengan program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan bangunan fasilitas umum, peningkatan SDM, kesejahteraan masyarakat baik ekonomi sosial, kesenian dan budaya. Kendala yang dihadapi yaitu kondisi geografis wilayah yang cukup jauh dari Pusat Kecamatan, potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Lung Anai masih belum memadai serta pengelolaan CSR yang belum maksimal, kurangnya kerjasama antara forum dan desa dalam perencanaan suatu pembangunan serta pengawasan yang masih terbatas.

Kajian Pratiwi Tedjo (2019) tentang Demokrasi, Kebijakan Umum, dan Keputusan Politik, menemukan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah sehingga karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh otoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik. Bentuk partisipasi masyarakat merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi yang mencerminkan nilai kebebasan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang ditujukan pada sikap warga negara untuk mengikuti atau memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik.

Imelda Veronica Gea, Muhammad Saleh, Rahmad Budi Suharto (2022) yang mengkaji peranan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap tingkat pembangunan desa menemukan bahwa peranan CSR dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa di Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa.

Beberapa riset lainnya bisa diidentifikasi berikut dengan masalah dan temuan yang relatif sama, di antaranya Siti Iskha Robiyah (2016) tentang “Implementasi Program CSR Rintisan Biogas Sebagai Usaha Menuju Desa Mandiri Energi: Studi di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”, Abdul Basit (2016) yang berjudul “Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Prima Mitrajaya Mandiri (Pmm) Dalam Pembangunan Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara”, Anita, Dewi Anggreniyang berjudul “Kinerja Perusahaan: Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Pertumbuhan Pendapatan” dan Herlina Astri yang berjudul “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

2. Perspektif Teoretis

Ada beberapa teori yang digunakan dalam membedah persoalan yang telah dirumuskan di bagian awal, yaitu teori pengambilan keputusan, teori kebijakan politik, teori kekuasaan politik, dan teori pengembang desa mandiri. Tiap teori dibahas secara ringkas berikut.

Pertama, Teori *Decision Making* atau Teori Pengambilan Keputusan. Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary, pengambilan keputusan adalah proses memutuskan tentang sesuatu yang penting, terutama dalam sekelompok orang atau dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses yang berkaitan dengan profesionalitas untuk mendorong berfungsinya organisasi yang lebih baik. Menurut Robbins (2007), pengambilan keputusan adalah penentuan pilihan di antara dua atau lebih alternatif. Terry (2003) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih,

tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Menurut Simon (1993) pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik.

Siagian (dalam Syamsi, 1995) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Harold dan Donnel juga mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai pemilihan di antara alternatif suatu cara bertindak. Hal tersebut menjadi inti dari perencanaan, sebuah rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Adapun teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menelaah mengenai keputusan dan berkaitan dengan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan tindakan hanya berpijak pada persepsinya pada situasi yang sedang dihadapi.

Moergan dan Celrullo (dalam Fatresi, 2017) mendefinisikan keputusan merupakan kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Sedangkan menurut Syamsi (dalam Fatresi, 2017), keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat

digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Kotler dan Armstrong (dalam Bahari dan Ashoer, 2018) mendefinisikan kebudayaan sebagai seperangkat nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh masyarakat sekitar, dari keluarga, atau lembaga formal lainnya sebagai sebuah pedoman perilaku.

Menurut Baron dan Byner (dalam Zulkilfi, 2018) menjelaskan pengambilan keputusan merupakan suatu proses melalui kombinasi individu dan kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan, pengambilan keputusan sebagai suatu proses mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menurut Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih (dalam Perwitasari, 2015). Selanjutnya menurut Siagian pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta serta data, penentuan matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang paling tepat (dalam Perwitasari, 2015).

Menurut Rayna & Ferley (dalam Santrock, 2014) untuk menjelaskan pengambilan keputusan remaja adalah model-ganda, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh dua sistem kognitif, analisis, dan pengalaman yang bersaing satu sama lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemikiran yang berupa pilihan satu antara beberapa alternatif yang digunakan sebagai penentu dari sejumlah pilihan, serta dicapai setelah dilakukan pertimbangan yang dipengaruhi oleh

kognitif, analisis, dan pengalaman untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan sering terjadi baik disadari maupun tidak disadari, berdasarkan pengumpulan fakta dan data, sebagai penentu keputusan yang dibuat agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Prosesnya meliputi penetapan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan dan menilai berbagai alternatif dan penerapannya, mengendalikan dan melakukan tindakan korektif (dalam Gutosudarmo & Sudita, 2016).

Kedua, Teori Kebijakan Politik. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 2010:7). Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi (Budiman, 2002:89). Menurut Miriam Budiardjo (2008:20), kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan

keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pejabat, tindakan tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan dan mengandung tujuan politik serta dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan yang dimaksud disini disepadankan dengan kata bahasa Inggris yaitu *policy* yang berbeda dengan kata kebijaksanaan. Adapun dalam kajian teori ini mengambil pengertian kebijakan politik. Dalam mengartikan kebijakan politik tidak dapat terlepas dari kebijakan publik atau *public policy*. Kebijakan politik yang dimaksud di sini adalah bagian bidang dari kajian kebijakan publik. Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan James E. Anderson mengartikan kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Subarsono, 2005: 2).

Dalam proses perumusan kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan (Suharno, 2010:52), antara lain:

- 1) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- 2) adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatifisme)
- 3) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- 4) adanya pengaruh dari kelompok luar
- 5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Ketiga, Teori Kekuasaan Politik. Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama. kekuasaan politik adalah kewenangan (*authority*), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa.

Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Dari pengertian kekuasaan menurut KBBI, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan

yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara atau pejabat negara. Kemudian karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh suatu ketua suatu organisasi.

Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama.

Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi tiga golongan yang dikenal dengan istilah *Trias Politica*. Adapun tiga golongan kekuasaan yang dimaksud, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Setiap golongan kekuasaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat peraturan dan Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif mempunyai tugas untuk menjalankan peraturan dan Undang-Undang yang telah diciptakan. Kekuasaan yudikatif mempunyai tugas untuk mengadili sesuatu seseorang yang memiliki kesalahan atau pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Berdasarkan pengertian ini, kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginannya.

Keempat, Teori Pembangunan Desa Mandiri. Seperti yang dikemukakan Rostow (1971), konsep pengembangan tidak hanya mencakup kepada hal-hal yang berkenaan pada proses, melainkan berupa proses dalam menyempurnakan suatu produk yang telah ada. Kemajuan dalam perkembangannya melewati periode waktu bagi masyarakat tradisional, prioritas kebutuhan untuk pertumbuhan, perbaikan dan penggunaan banyak. Dalam kasus ini, periode yang paling penting adalah waktu pergerakan yang dikendalikan oleh satu atau lebih bagian. Perkembangan pesat industri penting ini menarik sedikit energi ekonomi.

Menurut Haeruman (1997), ada dua cara untuk menjelajahi pedesaan:

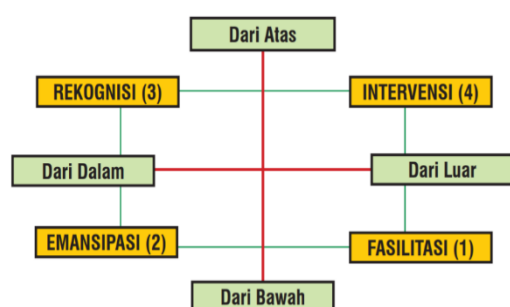
- a. Pembangunan pedesaan dianggap sebagai proses alami tergantung pada kemampuan dan kapabilitas desa. Pendekatan ini meminimalkan gangguan luar untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam jangka panjang.
- b. Di sisi lain, pembangunan pedesaan adalah interaksi potensi pedesaan dan proyek-proyek eksternal yang mempercepat pembangunan pedesaan.
- c. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan oleh Darsono dkk (2023:100—102), dalam membangun Desa Mandiri, setidaknya terdapat lima syarat yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

1. profesionalisme, menyangkut profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga aparat desa perlu meningkatkan keahlian dan kemampuannya

2. *Team work*, yaitu kerjasama yang solid baik di antara perangkat desa maupun dengan masyarakat
3. BUMDes, yaitu adanya badan usaha milik pemerintahan desa yang akan mendukung penguatan ekonomi masyarakat
4. spirit abdi desa, yaitu sikap yang tulus-ikhlas dalam menjalankan tugas di desa
5. evaluasi, yaitu adanya evaluasi untuk memahami dan mengetahui kekurangan, kelemahan, dan hambatan sehingga ditemukan solusi yang tepat. Tentu saja, hal-hal yang positif wajib terus dikembangkan.

Gambar 1: Strategi Membangun Desa



Sumber: Buku 5: Desa Mandiri, Desa Membangun

Ada beberapa strategi yang digunakan untuk membangun desa. Pertama, membangun kapasitas masyarakat pedesaan dan lembaga swadaya masyarakat yang kuat dan berdaya. Pembentukan lembaga publik dan lembaga swadaya masyarakat seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak-hak publik. Namun, hal ini merupakan sumber penting bagi terwujudnya kemandirian di desa dan awal terbentuknya masyarakat pedesaan, yang kemudian menjadi kekuatan melawan kebijakan pemerintah yang tidak ikut serta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, penguatan kapasitas pemerintah dan kerjasama lembaga swadaya masyarakat dalam pemerintahan pedesaan. Ada banyak cerita tentang kemandirian pedesaan yang didukung oleh teknik swakelola pedesaan melalui kekuatan LSM. Seperti yang dapat anda baca pada kotak di atas. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mendorong pemerintah desa yang dipimpin rakyat untuk membentuk pemerintahan desa yang peduli terhadap hak-hak rakyatnya. Kerjasama antara pemerintah otonomi pedesaan dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan khusus untuk menemukan pemimpin lokal dan pemimpin desa yang peka terhadap rakyat dan mau berinovasi dan berkembang. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa tentunya tidak hanya tercermin dari kemampuan teknis aparatur desa dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan. Tetapi juga tercermin dalam peran *human resource personality* (HRP) dalam menetapkan strategi dan rencana aksi.

Ketiga, pembangunan dan partisipasi dalam program sensus penduduk. Membangun masyarakat yang berkelanjutan dan mandiri biasanya membutuhkan program perencanaan masyarakat yang didukung dengan baik. Dia tidak di hadapan hukum. Pada tahun 2014, 6 desa masuk dalam rencana pembangunan desa komprehensif. Acuan atau landasan hukum pada saat itu adalah UU No. 32 Tahun 2004. Pengerjaan program pembangunan pedesaan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, telah disetujui oleh Dirjen No. 72 "Pengelolaan pedesaan". Namun, dalam praktiknya, masyarakat diharapkan membuat pengaturan. Rekomendasi untuk program ini adalah agar masyarakat dan dewan desa tidak ikut serta dalam politik program pembangunan daerah. Badan Desa tidak mengeluh bahwa daftar rekomendasi dari program Rencana Kerja Pemerintah Desa

diabaikan menjadi daftar permintaan. Meskipun perjuangan dilakukan melalui Federasi Musrenbangkam, Federasi SKPD dan Federasi Musrenbangkab, tuntutan utama rakyat tidak dipenuhi karena kepentingan pihak non-rakyat untuk berpartisipasi dalam politik pembangunan daerah. Terakhir, sebagian besar APBD digunakan untuk membiayai program-program daerah. Dalam kasus proyek pembangunan pedesaan, hanya manajer proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, bukan manajer proyek.

Keempat, untuk membangun pusat ekonomi yang mandiri dan produktif, saat ini banyak program pedesaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal. Seperti yang dilakukan oleh Desa Merkawang yang bekerjasama dengan PT SBI dalam meningkatkan perekonomian melalui program peningkatan UMKM, seperti adanya program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga), PERWIRA (Perempuan Wirausaha), WUB (Wirausaha Baru), REMPA (Remaja Perempuan PKK) dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang mencakup perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, termasuk gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kebijakan CSR PT Solusi Bangun Indonesia dalam mendukung kemandirian pembangunan Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Diharapkan, penelitian ini dapat menemukan jawaban atas permasalahan

yang telah dirumuskan dengan berusaha melihat gambaran secara holistik dari objek penelitian serta menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh.

Dengan objek kebijakan CSR PT Solusi Bangun Indonesia, penelitian ini dilaksanakan di PT Solusi Bangun Indonesia dan Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan November sampai dengan Desember 2023. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan memberikan interpretasi-makna, yang dalam perspektif Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data mengandung empat komponen utama (Sugiyono, 2014:99), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Kebijakan CSR PT Solusi Bangun Indonesia

Proses dalam pengambilan kebijakan untuk CSR PT SBI pada prinsipnya didasarkan dari peninjauan program sebelumnya yang sudah ditinjau langsung oleh Direksi PT SBI. Kemudian selain itu, untuk mengoptimalkan program CSR, pihak PT SBI juga mendengar masukan dari masyarakat untuk dapat mengetahui adanya kebutuhan atau permasalahan yang harus diselesaikan melalui program CSR. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pihak SBI berikut.

“Berdasarkan peninjauan pelaksanaan program CSR tahun

sebelumnya dan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan di tahun tersebut serta peninjauan dari pihak Direksi PT Solusi Bangun Indonesia.”

Proses pengambilan Kebijakan CSR PT SBI terdapat beberapa cara yang dilakukan yaitu identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, melihat kebutuhan yang diinginkan masyarakat, sekaligus partisipasi masyarakat untuk diberikan ruang agar bisa mengajukan program atau kebutuhan apa yang sedang diperlukan. Di dalam melakukan penggalian informasi ini dikemas dalam kegiatan yang dinamakan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM). FKM ini di hadiri oleh Kelompok Perwakilan Desa (KPD) yang menjadi perwakilan masyarakat dari masing masing desa yang menjadi Ring 1 dari PT SBI, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Desa, Manajemen dari PT. SBI (Comrel), tokoh Masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat, Pemerintah dan PT SBI pada dasarnya melaksanakan musyawarah untuk kemudian dapat mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh pihak masyarakat. Dalam musyawarah tersebut menentukan problematika sesuai dengan masyarakat dan Solusi yang bisa diberikan oleh CSR PT SBI. Kemudian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan itu adalah masyarakat, pemerintah dan PT SBI, sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Pihak masyarakat, Pihak pemerintah, dan pihak Perusahaan”

Hasil pembahasan dari Forum Komunikasi Masyarakat (FMK) yang sudah menentukan hasil tersebut kemudian dilakukan rapat internal PT SBI di jajaran *Community Relation* (COMREL) untuk menentukan

kebutuhan yang bisa dipenuhi melalui program CSR tersebut. Namun, keputusan pemberian CSR PT SBI ada di jajaran direksi. Keputusan yang sudah dihasilkan oleh PT SBI kemudian disalurkan melalui kelompok masyarakat dan pemerintah desa yang akan menerima manfaat CSR.

Desa Merkawang yang merupakan salah satu desa penerima CSR dari PT SBI selama ini sudah menerima bentuk CSR melalui program yang dilakukan oleh Comrel PT Solusi Bangun Indonesia dengan cakupan program karitatif berupa kegiatan penyerahan sembako, hewan kurban, perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Program infrastruktur berupa program peningkatan kualitas fasilitas publik. Program pengembangan kapasitas berupa program beasiswa pendidikan, program penyebarluasan nilai-nilai anti kekerasan, penguatan pendidikan formal dan non formal, serta program pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat berupa program pendampingan UMKM, pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan, penguatan ekonomi desa, dan penguatan kegiatan pos pelayanan kesehatan terpadu.

Proses Keputusan yang dilaksanakn oleh PT SBI dalam memberikan CSR pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan standart prosedur operasional yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Diawali dengan adanya penjangingan aspirasi dari masyarakat dan pemerintah, kemudian dilakukan pembahasan di internal perusahaan sampai dengan pelaksanaan realisasi kegiatan.

2. Road Map CSR PT Solusi Bangun Indonesia

CSR PT SBI telah merumuskan lima kebijakan dan *roadmap* CSR dengan mengusung semangat bersinergi

dan tumbuh bersama masyarakat sebagai berikut. Pertama, SBI Cerdas yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan. Salah satu yang telah dilakukan melalui SBI Cerdas adalah program *Enterprise-Based Vocational Education* (EVE). Program EVE ini merupakan program beasiswa pendidikan untuk Masyarakat Indonesia yang bekerjasama dengan Universitas Politeknik Negeri Jakarta. Beasiswa ini hanya sampai pada DIII Teknik Mesin. Lulusan Program EVE ini menjadi prioritas apabila di PT. SBI membuka lowongan pekerjaan. Kedua, SBI Sehat yakni inisiatif CSR yang berfokus pada kebijakan perusahaan tentang kesehatan masyarakat. Ketiga, SBI Mandiri yakni kebijakan perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM. Salah satu program yang telah dijalankan adalah PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) di sekitar SBI Tuban. SBI memberikan dukungan berupa penguatan, pendampingan kepada perempuan untuk bisa berkembang secara individu maupun kelompok & mampu mandiri secara ekonomi. Keempat, SBI Peduli yakni dukungan program untuk infrastruktur dan kepedulian sosial. Kelima, SBI Lestari yakni kebijakan perusahaan untuk mendukung konservasi lingkungan.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa *road map* CSR Solusi Bangun Indonesia adalah merupakan kegiatan yang disusun berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya yang diekstrapolasi sejauh lima tahun yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan ataupun kebutuhan yang mendesak saat ini. PT SBI bertekad menjalin komunikasi harmonis dengan masyarakat melalui program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Visi dan misi utama CSR PT SBI diharapkan bisa menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan alam melalui program yang terarah, tepat guna, dan tepat sasaran.

3. Implikasi CSR PT SBI terhadap Pembangunan Kemandirian Desa Merkawang

Implikasi CSR PT SBI terhadap pembangunan Desa Merkawang bisa dipaparkan ringkas terhadap beberapa aspek berikut.

a. Aspek Kesehatan

Dalam bidang sosial khususnya di aspek kesehatan program penyuluhan kesehatan, pemberian tambahan PMT (Program Makanan Tambahan) berupa susu, pengobatan gratis secara periodik yang pelaksanaannya dilakukan bersama Puskesmas setempat dengan tenaga kesehatan dokter, perawat dan bidan dari Puskesmas setempat. Dari kegiatan ini masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan dapat melakukan konsultasi kesehatan ke petugas kesehatan yang ada, selain itu masyarakat semakin mengerti akan pentingnya kesehatan bagi dirinya, mengerti dan menerapkan pola hidup sehat yakni dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungannya serta mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi.

Meski demikian, dampak pemberdayaan di bidang kesehatan ini belum sepenuhnya membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan, padahal berbagai upaya sudah dilaksanakan seperti penyuluhan kesehatan oleh tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan dan lain-lain. Dampak pembelajaran ini memang ada, namun belum maksimal.

b. Aspek Pendidikan

Pemberdayaan bidang sosial dalam aspek pendidikan sudah mengindikasikan bahwa pentingnya pendidikan bagi masyarakat, jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia telah menyalurkan beasiswa-beasiswa

bagi anak-anak dalam usia sekolah yang berada dalam masyarakat sekitar area produksi perusahaan khususnya ring I dan ring II. Dari kegiatan ini telah membelajarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka agar memperoleh suatu pengetahuan yang baru sehingga dapat menjadi anak lebih pandai dari orang tuanya. Tidak hanya anak-anak saja yang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuannya, para orangtua yang tidak memiliki pekerjaan maka melalui pendidikan masyarakat yakni melalui pendidikan keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kesadaran bagi masyarakat.

Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan hidup mandiri inilah yang dinamakan pendidikan *life skill*. Yang memiliki tujuan yakni melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan keterampilan, keahlian dan kecakapan serta nilai-nilai keprofesian untuk mendorong produktivitas sebagai tenaga kerja yang andal atau kemandirian usaha. Sehingga dalam pelaksanaannya diawali dengan langkah-langkah yakni *need assessment* dengan teknis mencari informasi peluang usaha sesuai dengan jenis pembelajaran yang akan dilatih serta *need assessment* dengan cara mengembangkan usaha baru dengan memberdayakan potensi sumber daya sekitar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Program CSR PT Solusi Bangun Indonesia melalui bidang pendidikan ini telah melaksanakan pendidikan vokasional kepada masyarakat yakni memberdayakan potensi sumber daya sekitar untuk dapat lebih meningkatkan usahanya sehingga memiliki dampak belajar yang dapat menghasilkan

pengetahuan baru, keterampilan baru serta kesadaran akan sikap baru pula sehingga daya tawar masyarakat semakin meningkat dan berkelanjutan. Pendidikan yang dilakukan oleh PT SBI melalui program kursus bahasa Inggris. Selain itu memberikan beasiswa kepada masyarakat untuk dapat melakukan pelatihan melalui EVE program yang kemudian *output* dari hal tersebut adalah masyarakat dapat bekerja di PT SBI ataupun perusahaan BUMN yang lain.

c. *Aspek Pembangunan Sarana Umum*

Dari kegiatan pembangunan sarana ibadah di sini sudah wajar bila masyarakat yang memiliki latar belakang religi yang kuat dapat membelajarkan dirinya akan pentingnya mesjid guna meningkatkan amal ibadah secara personal yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka merasa memiliki tanggungjawab sosial yang tumbuh dengan sendirinya pada diri mereka melalui belajar yang mereka lakukan, sehingga mereka merasa butuh dan berhak memiliki untuk sama-sama menjaga serta merawat bangunan mesjid sebagai sarana ibadah untuk kepentingan masyarakat.

Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif, konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan insiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberikan kekuatan kepada masyarakat. Menurut Koho dalam W. Tamba (2007: 126), partisipasi masyarakat dapat tumbuh sehingga perlu diketahui yakni meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan partisipasi dalam evaluasi.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di bidang pembangunan sarana

melalui program CSR PT SBI sebagian ada yang sudah menerapkan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai subjek bukan objek dari pembangunan, namun juga masih ada yang belum memberikan partisipasi dan menempatkan masyarakat bukan sebagai subjek melainkan objek pembangunan, jadi tidak heran bila hasil pembangunan kurang memberikan manfaat karena rasa memiliki dari masyarakat sangat kurang tumbuh dari dalam dirinya serta tidak mengajarkan kepada masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat dengan saran atau masukan kepada PT SBI melalui Forum Komunikasi Masyarakat (FKM).

KESIMPULAN

Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar, PT SBI telah melaksanakan CSR dengan lima pilar yang direalisasikan melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan, yaitu SBI Cerdas, SBI Sehat, SBI Mandiri, SBI Lestari, dan SBI Peduli. Meskipun secara teoretis setiap pengambilan kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Suharno, 2010:52), seperti adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatifme), adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu, dalam pengambilan kebijakan untuk pemberian CSR kepada Desa Merkawang pada prinsipnya PT SBI telah melibatkan pihak masyarakat, pihak pemerintah dan pihak perusahaan.

Roadmap CSR PT Solusi Bangun Indonesia disusun berdasarkan kegiatan *roadmap* tahun sebelumnya yang diekstrapolasi sejauh lima tahun yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan ataupun kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, arah pengembangan CSR PT SBI telah dirumuskan dengan terencana dan

sistematis sesuai dengan kebijakan perusahaan.

CSR PT SBI yang diberikan kepada desa-desa di sekitar perusahaan berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat desa yang bisa diukur dari meningkatnya Indeks Desa Membangun di Desa Merkawang menuju desa maju dan mandiri yaitu aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Dewi Anggreni. 2021. Kinerja Perusahaan: Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Pertumbuhan Pendapatan. Dalam Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol. 19, No. 2. September. <https://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/3608/pdf>
- Astri, Herlina. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidupmanusia Indonesia. Jurnal DPR RI.
- Basit, Abdul. 2016. Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Prma Mitrajaya Mandiri (PMM) dalam Pembangunan di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam Jurnal Administrasi Negara. <https://www.e-jurnal.com/2016/02/peranan-corporate-social-responsibility.html>
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1998, Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Masagung
- Darsono, dkk. 2023. Pengantar Birokrasi Indonesia. Surabaya: Cipta Media Nusantara. E-book pada link https://books.google.co.id/books/about/PENGANTAR_BIROKRASI_INDONESIA.html?id=uUy1EAAAQBAJ&redir_esc=y
- Darsono, Ratna Ani Lestari, dan Ali Achsan Mustafa. 2023.

- Pengembangan Wawasan Ekosocioekopreneur sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Desa Mandiri. Dalam *Journal of Community Development*, Volume 3, Nomor 3, April, hal. 334-346. <https://comdev.pubmedia.id/index.php/comdev/article/view/123>
- Gea, Imelda Veronica, Muhammad Saleh, Rahcma Budi Suharto. 2022. Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tingkat Pembangunan Desa. Dalam *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen Unmul*. Vol 18 No 3.
- Gutosudarmo & Sudita. 2016. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Heinz Wehrich and Harold Koontz. 1993. *Management A. Global Perspective*. Tent. Edition. New York : McGraw-Hill, Inc.
- Irawan, N. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Irfan Islamy. 1984. *Prinsip-Prinsip Pembuatan Kebijakan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Marnelly, T. Romi. 2012. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*. <https://jab.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAB/article/viewFile/910/903>.
- Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta : PolGov.
- Murni, Sri, Jamal Amin, Nur Fitriyah. 2015. Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu. Dalam *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.1, Januari-Maret 2015.
- Noeng Muhadjir. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin,
- Pranoto, Asa Ria, Dede Yusuf. 2014. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Vol. 18 No. 1.
- Persada Nistrasi Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Adminegara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Robiyah, Siti Iskha. 2016. Implementasi Program CSR Rintisan Biogas Sebagai Usaha Menuju Desa Mandiri Energi: Studi di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1129>
- Rusmini. 2020. Pelaksanaan Program Kebijakan Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol 6, No 3 (2020). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3997>.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyati dan Darsono. 2023. Pelaksanaan Good Governance dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Dalam *Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 3 No. 2, Desember, hal. 46—63. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/3485>
- Tedjo, Pratiwi. 2019. Demokrasi, Kebijakan Umum, Dan Keputusan Politik. Dalam *Jurnal Mimbar Administrasi FISIP Universitas 17*

Agustus 1945 Semarang Vol. 15 No.
9.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik
Teori dan Proses. Yogyakarta:
Media Pressindo.